

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
EVALUATIF DALAM TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PERSPEKTIF
KONSTITUSIONAL**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Program Studi Magister Hukum Tata
Negara



Oleh:

Halimatus Syakdiah
NIM. 02040424007

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halimatun Syakdiah
NIM : 02040424007
Program : Magister (S-2)
Prodi : Hukum Tata Negara
Institusi : UEN Suran Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dinujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



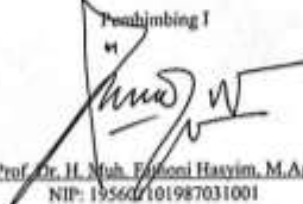
Halimatun Syakdiah
NIM. 02040424007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Implikasi Yuridis Kewenangan Evaluatif Dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Konstitusional" yang ditulis oleh Halimatus Syakdiah ini telah disetujui pada tanggal 19 Mei 2025.

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Mub. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP: 195607101987031001

Pembimbing II



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP: 197208062014112001

PENGESAHAN TIM UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Implikasi Yuridis Terhadap Kewenangan Evaluatif Dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Konstitusional" yang ditulis oleh Halimatus Syakdiah ini telah diuji pada tanggal 22 Oktober 2025.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

2. Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.

3. Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.

4. Dr. Achmad Fageh, M.H.I.

Surabaya, 5 Desember 2025

Dekan



Dr. H. Saifuddin Musa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Halimatus Syakdiyah
NIM : 02040424007
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : halimatussyakdiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : Implikasi Yuridis Terhadap Kewenangan Evaluatif dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Konstitusional

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 September 2025

Penulis

(Halimatus Syakdiyah)

ABSTRAK

Kewenangan evaluatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib memunculkan problematika konstitusional yang signifikan. Secara konseptual, DPR mempunyai tiga fungsi utama, diantaranya legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, munculnya kewenangan evaluatif terhadap pejabat negara setelah pengangkatan menimbulkan perdebatan mengenai batas fungsi pengawasan tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang legitimasi kewenangan tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* antar lembaga negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan evaluatif DPR tidak memiliki dasar eksplisit dalam UUD 1945 maupun dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Secara yuridis, kewenangan ini memperluas fungsi pengawasan DPR di luar batas konstitusional, karena dilakukan terhadap pejabat independen yang telah melalui mekanisme pengangkatan konstitusional. Akibatnya, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dan pelanggaran terhadap prinsip kemandirian lembaga negara, terutama terhadap lembaga-lembaga yang secara hukum bersifat otonom dari pengaruh politik DPR.

Kata Kunci: DPR, implikasi yuridis, kewenangan evaluative

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

The evaluative authority of the House of Representatives (DPR), as regulated in DPR Regulation Number 1 of 2020 concerning Rules of Procedure, raises significant constitutional issues. Conceptually, the DPR has three main functions legislation, budgeting, and oversight as affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the emergence of evaluative authority over state officials after their appointment has sparked debate regarding the limits of the DPR's supervisory role. This situation raises questions about the legitimacy of such authority within Indonesia's constitutional system, which is founded on the principles of separation of powers and checks and balances among state institutions.

This research is a normative legal study using a statute approach and a conceptual approach. The legal sources used include primary and secondary legal sources.

The findings reveal that the DPR's evaluative authority has no explicit foundation either in the 1945 Constitution or in Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD (Law on MD3). Juridically, this authority expands the DPR's supervisory function beyond its constitutional limits, as it is exercised over independent officials who have already undergone constitutionally mandated appointment procedures. As a result, there is a potential overlap of authority and a violation of the principle of institutional independence, particularly concerning bodies that are legally autonomous from the DPR's political influence.

Keyword: DPR, legal implications, evaluative authority

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM UJIAN TESIS.....	iv
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KERANGKA TEORITIK.....	23
A. Teori Trias Politica.....	23
1. Sejarah dan Perkembangan Trias Politica	23
2. Implementasi Trias Politica dalam Pemerintahan Indonesia.....	26
B. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	33
1. Prinsip pembentukan	33
2. Hierarki Norma.....	36
C. Teori Kewenangan	40
1. Pengertian dan Konsep Kewenangan	40

2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	46
3. Relevansi Teori Kewenangan terhadap Fungsi DPR	49
BAB III KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN DPR NO 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DPR.....	48
A. Latar Belakang Pembentukan Tata Tertib DPR	48
B. Dasar Normatif Penambahan Pasal 228A	50
C. Kedudukan Peraturan Tata Tertib DPR.....	54
D. Konsekuensi Pemberlakuan Pasal 228A	57
BAB IV IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN EVALUATIF DPR	61
A. Kewenangan DPR pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020	61
B. Implikasi atas Penambahan Kewenangan DPR dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020	70
C. Implikasi Yuridis dari Kewenangan Evaluatif DPR terhadap Independensi Kehakiman	73
D. Implikasi Yuridis dari Kewenangan Evaluatif DPR terhadap Prinsip Trias Politica	86
E. Potensi DPR menjadi Lembaga <i>Super Body</i> dan Risiko Terjadinya <i>Abuse of Power</i>	92
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. 2nd ed. Sinar Grafika, 2014.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 2. Konstitusi Press, 2006.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Asshidiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.
- Blackstone, William. *Commentaries on the Laws of England in Four Books*. Vol. 1. Clarendon Press, 1753.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiardjo, Miriam, and Ibrahim Ambong. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Debora Silalahi, Artha. "Pilihan Hukum Kedaruratan Dan Pengawasan DPR RI Terhadap Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Dalam Tindak Lanjut Penanganan Pandemi Corona Virus Disease." Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, 2021.
- Ekatjajana, Widodo. *Pengujian Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilannya Di Indonesia*. Pustaka Sutra, 2008.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. 2nd ed. Kanisius, 2012.
- Fatwa, A.M. *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi*. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Haikal Rifurio, Muhammad. "Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 1 (2025).
- Haris, Syamsuddin. *Partai Pemilu Dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Hasmiyati, Lukman Ansar, A. Sultan Sulfian, and Tarmizi. "Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 3, no. 1 (2025).
- Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi, 2010.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. 1st ed. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Press, 2007.
- Indroharto. *Kedudukan Hukum Administrasi Negara*. Kencana, 2020.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parleментар Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, 2010.

- Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)." *Jurnal Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 6, no. 1 (2024).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, 1945.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. University of California Press, 1967.
- Kenedi, John. "Analisis Pidana Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2019).
- Kenedi, John. "Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 5, no. 1 (2016).
- M. Friedman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
- M Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2002.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*. Cet. 4. Rajawali Pers, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, 2005.
- Manan, Bagir. *Teori Dan Politik Konstitusi*. FH UII Press, 2004.
- Montesquieu. *The Spirit of Laws*. Hafner Press, 1949.
- Muchlisin. "Kedudukan Serta Fungsi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia." *Jurnal Mimbar Yustisia* 3, no. 2 (n.d.): 2019.
- Munir, Ahmad, and Moh Hudi. "Keadilan Dalam Retribusi Parkir Berlangganan." *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018).
- Muwahid. "Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (2018).
- Nugroho, Wahyu. "Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila." *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 3 (2013).
- Nurcholis, Hanif. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo, 2005.
- Pasal 67 Dan 68 Undang-Undang No 13 Tahun 2019 Tentang MPR,DPR, DPD, Dan DPRD.
- Pasal 72 Undang-Undang No 13 Tahun 2019 Tentang MPR,DPR,DPD, Dan DPRD.
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
- Phillips, Owen Hood, Paul Jackson, and Patricia Leopold. *Constitutional and Administrative Law*. Sweet & Maxwell, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ranadirekta, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Fokus Media, 2009.

- Said, Abd Razak, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024).
- Secondat, Charles de, and Baron de Montesquieu. *De l'esprit Des Lois (The Spirit of the Laws)*. Prancis, 1749.
- Soejono, Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, 2015.
- Sulastri, Ratih. "Keabsahan Presumptio Iustae Causa Sebagai Pilar Keadilan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Journal of Human And Education* 4, no. 6 (2024).
- Syaukani, Imam, and A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Cet. 2. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Vile, M.J.C. *Constitutionalism and the Separation of Powers*. Oxford University Press, 1967.
- Vlies, I. C. van der. *Buku Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM, 2005.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Revisi Tata Tertib DPR Merusak Tatanan Negara Hukum Dan Demokrasi: Melampaui Kewenangan, Rentan Disalahgunakan Dan Menjadi Ancaman Bagi Independensi Lembaga Negara*. February 6, 2025. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/revisi-tata-tertib-dpr-merusak-tatanan-negara-hukum-dan-demokrasi-melampaui-kewenangan-rentan-disalahgunakan-dan-menjadi-ancaman-bagi-independensi-lembaga-negara/>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A